

AS Cari Cara Bantu Kebangkrutan Sri Lanka

KOLOMBO(IM) - Pejabat senior Amerika Serikat tiba di Sri Lanka Minggu (26/6). Washington akhirnya memutuskan untuk menemukan cara membantu negara kepulauan itu dalam pergolakan krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Delegasi AS dipimpin oleh Wakil Asisten Menteri Keuangan untuk Asia Robert Kaproth dan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Asia Selatan dan Tengah Kelly Keiderling. Selama empat hari mereka akan berada di Sri Lanka dan bertemu dengan berbagai perwakilan politik, ekonomi, dan organisasi internasional.

"Menjelajahi cara paling efektif bagi AS untuk mendukung warga Sri Lanka yang membutuhkan, warga Sri Lanka bekerja untuk menyelesaikan krisis ekonomi saat ini, dan Sri Lanka merencanakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk masa depan," kata Kedutaan Besar AS dalam sebuah pernyataan.

"Kunjungan ini menggarisbawahi komitmen berkelanjutan kami terhadap keamanan dan kemakmuran rakyat Sri Lanka," kata Duta Besar AS untuk Sri Lanka Julie Chung.

Chung mengatakan, ketika orang-orang Sri Lanka menanggung beberapa tantangan ekonomi terbesar dalam sejarah, AS berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi. Washington akan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi.

AS selama dua minggu ter-

akhir telah mengumumkan bantuan jutaan dolar ke Sri Lanka. Washington telah mengumumkan 120 juta dolar AS dalam pembiayaan baru untuk usaha kecil dan menengah, 27 juta dolar AS kontribusi untuk industri susu Sri Lanka, dan 5,75 juta dolar AS dalam bantuan kemanusiaan untuk membantu yang paling terpuak oleh krisis ekonomi. Sedangkan enam juta dolar AS lainnya diberikan dalam bentuk hibah baru untuk mata pencaharian dan bantuan teknis untuk reformasi keuangan.

Kolombo sebelumnya pun telah bertahan dengan jalur kredit empat miliar dolar AS dari negara tetangga India. Sri Lanka juga telah menerima janji sebesar 300 juta hingga 600 juta dolar AS dari Bank Dunia untuk membeli obat-obatan dan barang-barang lainnya. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe pekan lalu mengumumkan ekonomi telah runtuh. Negara itu menghadapi berkurangnya cadangan devisa dan utang yang meningkat, diperburuk oleh pandemi dan masalah jangka panjang lainnya.

Sri Lanka mengatakan tidak dapat membayar tujuh miliar dolar AS utang luar negeri yang jatuh tempo tahun ini, sambil menunggu hasil negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai paket penyelamatan. Negara ini harus membayar rata-rata 5 miliar dolar AS per tahun hingga 2026. Pihak berwenang telah meminta IMF untuk memimpin konferensi untuk menyetujui pemberian pinjaman Sri Lanka. ● gul



IDN/ANTARA

PERTEMUAN KTT G7 DI JERMAN

Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berfoto bersama di Schloss Elmau, dekat Garmisch-Partenkirchen, Jerman, pada Minggu (26/6), di tengah KTT G7.

Korut Bakar Jenazah Pasien Covid-19

Sebagian besar korban Covid-19 adalah anak-anak kekurangan gizi dan orang tua.

PYONGYANG (IM) - Korea Utara (Korut) dilaporkan telah secara paksa mengkremasi jenazah para warganya yang diduga meninggal akibat Covid-19. Meski sudah secara terbuka mengumumkan memiliki kasus Covid-19, tak ada yang tahu secara pasti seberapa parah wabah itu berlangsung di negara tersebut.

Laman Daily NK, mengutip seorang sumber yang tinggal di Provinsi Pyongan Utara, mengungkapkan, otoritas Korut telah melarang keluarga korban untuk menguburkan anggota keluarganya yang meninggal akibat Covid-19.

"Para petugas pengendalian penyakit berkerumun dan mengkremasi mayat orang-orang yang meninggal karena dugaan infeksi Covid-19. Pemerintah mengintimidasi keluarga, mengancam mereka dengan hukuman berat jika mereka melanjutkan dan mengubur mayat (sendiri)," kata sumber itu kepada Daily NK, dilaporkan pada Senin (27/6).

Di awal pandemi, banyak negara mengkremasi jenazah para korban Covid-19. Hal itu menjadi bagian dari upaya pencegahan penyebaran penyakit. Namun untuk melakukannya, pihak keluarga harus

memberi persetujuan. Di Korut, otoritas atau petugas tidak memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang pengaturan pemakaman. Tanpa persetujuan keluarga, mereka mengkremasi para pasien atau terduga pasien Covid-19 yang meninggal.

"Mereka yang berduka berkelahi dengan petugas pengendalian penyakit, menuduh mereka mencegah keluarga melakukan apa yang mereka inginkan dengan orang yang mereka cintai yang sudah meninggal. Di distrik saya juga, banyak orang telah meninggal, dan cara menanganinya mayat-mayat itu sepenuhnya sama," kata sumber yang dikutip Daily NK.

Sepengetahuannya, hanya sedikit anak muda yang meninggal. Sebagian besar korban Covid-19 atau terduga

Covid-19 adalah anak-anak kekurangan gizi, orang tua, dan keluarga yang sekarat. "Mereka tidak pernah memberi tahu kami angka pastinya (jumlah korban) karena mereka khawatir membuat kami takut," ucapnya.

Sejak pandemi Covid-19 merebak pada 2020, Korut telah menutup semua akses perbatasannya. Ketika hampir seluruh negara di dunia berjuang mengatasi wabah, Korut sama sekali tak melaporkan penemuan kasus Covid-19. Namun klaim itu banyak diragukan para ahli kesehatan.

Pada 12 Mei lalu, Korut akhirnya mengumumkan penemuan kasus Covid-19 pertamanya. Ratusan ribu warganya telah mengalami demam dan diduga terinfeksi Covid-19. Kendati demikian, Pyongyang

mengklaim berhasil mengatasi dan mengendalikan kondisi tersebut.

Banyak pihak mengkhawatirkan merebaknya wabah Covid-19 di Korut. Terisolasi secara ekonomi akibat sanksi, membuat sistem kesehatan di sana dinilai rapuh. Awal bulan ini, kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA) melaporkan, saat ini Korut sedang memperluas produksi pasokan obat-obatan esensial. Namun tak dijelaskan berapa banyak obat yang diproduksi.

Selain itu, KCNA mengungkapkan, Korut juga telah menghentikan tim untuk mendistribusikan makanan serta obat-obatan kepada warga di seluruh wilayah. Petugas medis pun dikerahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. ● tom

Sejumlah Komandannya Tewas, Putin Tarik Pensiunan Perwira Terjun ke Medan Perang

KIEV(IM) - Putin telah memanggil seorang jenderal gemuk dari masa pensiunnya untuk mengambil alih komando pasukan di Ukraina setelah satu putaran pembersihan komandan tinggi telah membuatnya 'menggores laras'.

Jenderal Pavel (67), telah dipanggil dari kehidupannya yang nyaman di pinggiran kota Moscow dan disuruh mengenakan seragam tentara yang dibuat khusus dan pergi ke garis depan Ukraina timur. Dia sekarang akan memimpin pasukan khusus Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut setelah mantan komandan unit tersebut terluca parah dalam serangan artileri.

Seorang veteran invasi naas Uni Soviet ke Afghanistan pada 1980-an dan anggota pasukan khusus Rusia, Jenderal Pavel telah melepaskan dirinya jauh sejak pensiun lima tahun lalu. Dia diketahui makan lima kali sehari dan menghabiskannya dengan satu liter vodka. Sejak kembali ke dinas, dia harus membuat seragamnya secara khusus dan dia perlu memakai dua set pelindung tubuh untuk memastikan tubuhnya terlindungi.

Sebuah sumber intelijen senior tadi malam mengatakan kepada Daily Star Sunday: "Putin sekarang sedang mengorek laras. Sebagian besar komandan seniornya yang baik dan tangguh dalam pertempuran telah terbunuh atau terluka dalam pertempuran di Ukraina sehingga dia terpaksa mengirim perwira kelas dua ke garis depan yang tidak bertahan lama.

"Putin seperti bos mafia yang tidak bisa ditolak oleh siapa pun. Jika seorang pensiunan jenderal mendapat pesan dari Putin yang mengatakan bahwa ibu Rusia membutuhkan Anda untuk berperang di Ukraina, tidak banyak yang dapat Anda lakukan. Sekarang ada pelarian dari Rusia berkat sanksi."

Meskipun merebut kota utama Severodonetsk kemarin, ada laporan bahwa Putin kini telah memecat jenderal nomor satu di Ukraina, seolah-olah karena kecepatan glasial dari dorongan utama tentara Rusia untuk mencaplok Donbas.

Pemecatan Jenderal Alexander Dvornikov, yang dikabarkan mabuk dan tidak dipercaya oleh para perwiranya, akan menandai satu lagi perombakan besar-besaran pada struktur komando Putin, dan ekspresi frustrasi sang diktator dengan keadaan perang-

nya di Ukraina, yang dia duga akan berhasil dalam empat hari.

Dvornikov, yang dikenal sebagai 'Penjagal Aleppo' karena perusakan udaranya pada 2015 atas

kota terbesar Suriah yang membuatnya menjadi seperti dibom, akan menjadi jenderal ketujuh yang dilaporkan telah dipecat Putin sejak awal Juni, serta kehilangan sebanyak empat belas tewas dalam tugas.

Komando tinggi Rusia diperkirakan telah memecat sejumlah perwira tinggi dari peran komando kunci di Ukraina sejak awal Juni, menurut Kementerian Pertahanan Inggris.

Dengan Dvornikov sebagai komandan Grup Pasukan Selatan dan kemungkinan bertindak sebagai komandan operasional keseluruhan untuk tentara Rusia di Ukraina, pemecatannya dilaporkan terjadi bersamaan dengan pemecatan Jenderal-Kolonel Andrei Serdyukov dari Pasukan Lintas Udara (VDV).

Dvornikov dilaporkan akan digantikan oleh Kolonel Jenderal Sergei Surovikin sebagai komandan SGF. Kelompok tentara meliputi kekuatan utama tentara Rusia yang berusaha merebut dan menduduki wilayah Ukraina.

Menurut Rob Lee, akademisi perang yang dihormati dari Kings College London di antara institusi lain, Surovikin dipenjarakan dua kali dalam karirnya.

Satu kali karena diduga menjual senjata secara ilegal, dan satu kali karena memimpin kolom militer selama kudeta Agustus 1991 yang menewaskan tiga pengunjung rasa di Moskwa. Catatan ini menjadi masalah ketika dia ditugaskan sebagai polisi militer.

Beberapa sumber mengklaim bahwa Putin secara pribadi mengatur keputusan perang dan menggunakan kapak pada komandan yang dia anggap berkinerja buruk.

Pemecatan kepala udara Serdyukov akan menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab atas kinerja yang buruk - dan tingginya korban - dari unit udara Rusia, terutama dalam operasi awal di sekitar Kyiv.

Serdyukov tampaknya telah disalahkan atas kegagalan dalam operasi untuk merebut bandara sebagai Hostomel dekat Kyiv pada 24 Februari - hari pertama perang - di mana pasukan elit dari Pasukan Lintas Udara Rusia (VDV) dihancurkan dalam serangan yang gagal berulang kali.

Secara keseluruhan sebanyak empat belas jenderal Rusia diperkirakan telah tewas selama invasi ke Ukraina, meskipun jumlahnya masih diperdebatkan. Rusia tidak merilis informasi tentang perwira tinggi yang hilang. ● gul

Uni Afrika Serukan Penyelidikan Tewasnya 23 Migran di Perbatasan Maroko-Spanyol

JOHANNESBURG - Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat menyampaikan keprihatinan atas tewasnya puluhan migran Afrika yang berusaha menyeberang dari Maroko ke daerah Melilla di Spanyol. Dia menyerukan agar peristiwa itu segera diselidiki.

"Saya mengungkapkan keterkejutan serta keprihatinan saya yang mendalam atas perlakuan kejam dan merendahkan terhadap para migran Afrika yang berusaha melintasi perbatasan internasional dari Maroko ke Spanyol, dengan kekerasan berikutnya yang menyebabkan kematian sedikitnya 23 orang dan melukai lebih banyak lagi," kata Mahamat lewat akun Twitter resminya, Senin (27/6), dikutip Anadolu Agency.

Menurut dia, kejadian itu tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja.

"Saya menyerukan penyelidikan segera atas masalah ini dan mengingatkan semua negara tentang kewajiban mereka di bawah hukum internasional untuk memperhatikan semua migran dengan bermartabat serta memprioritaskan keselamatan dan hak asasi mereka, sambil menahani diri dari penggunaan kekuatan yang berlebihan," tulisnya.

Sekitar 2.000 migran Afrika, kebanyakan asal Sudan, mencoba menyeberang pagar perbatasan militer pada Jumat (24/6) pekan lalu. Mereka kemudian diadung paksa ke Maroko dan Maroko yang melakukan aksi represif. Tindakan kekerasan menyebabkan 23 migran tewas. Sementara organisasi Walking Borders mengklaim, sedikitnya 37 orang meninggal dalam kejadian tersebut.

Pada Minggu (19/6) lalu, Asosiasi Hak Asasi Manusia

Maroko (AMDH) menerbitkan sebuah gambar yang menunjukkan pihak berwenang dari negara Afrika Utara itu menggali sekitar 20 kuburan. AMDH memprediksi kuburan itu dimaksudkan untuk para migran yang meninggal dalam kecelakaan di perbatasan.

Sejumlah organisasi nonpemerintah telah merilis pernyataan bersama menuntut penyelidikan atas kejadian tersebut. AMDH pun secara khusus memohon agar jenazah para migran tak dikubur tanpa penyelidikan.

Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez tak mengomentari tentang tewasnya puluhan migran di perbatasan negaranya dengan Maroko. Dia justru mengapresiasi kerja sama kedua negara di perbatasan. Menurutnya, upaya migrasi massal itu "diselesaikan dengan baik". ● ans

Sri Lanka Akan Mengalami Pemadaman Listrik 3 Jam Hingga 3 Juli Mendatang

COLOMBO(IM) - Komisi Utilitas Publik Sri Lanka (PUC-SL) telah menyetujui rencana pemadaman listrik selama 3 jam yang akan dimulai pada 27 Juni hingga 3 Juli mendatang.

Dikutip dari laman www.dailymirror.lk, Senin (27/6), pemadaman listrik selama 1 jam 40 menit akan diberlakukan pada siang hari, dilanjutkan 1 jam 20 menit pada malam hari.

Sedangkan pemadaman listrik selama dua jam akan dikenakan untuk Grup CC mulai pukul 06.00 hingga pukul 08.00 pagi

waktu setempat, kecuali pada 2 dan 3 Juli 2022. Kemudian pemadaman listrik selama 3 jam akan diberlakukan untuk grup MNOXYZ mulai pukul 05.00 hingga pukul 08.00 pagi, kecuali pada 2 dan 3 Juli 2022.

Perlu diketahui, perekonomian Sri Lanka saat ini tengah mengalami kebangkrutan. Tarif kendaraan roda tiga seperti tuk tuk di Sri Lanka untuk kilometer (km) kedua dinaikkan menjadi 90 rupee Sri Lanka mulai hari Minggu kemarin.

Pernyataan ini disampaikan Presiden Serikat Pengemudi Ro-

da Tiga Seluruh Pulau di negara itu, Lalith Dharmasekera.

Dikutip dari laman www.dailymirror.lk, Senin (27/6), ia mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mendesak pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar. Tarif untuk km kedua sebelumnya berada di angka 80 rupee Sri Lanka, mengikuti kenaikan harga bahan bakar sebelumnya. "Meski tidak ada revisi tarif di km pertama sebesar 100 rupee Sri Lanka, namun tarif km kedua tetap naik," kata Dharmasekera. ● tom

PBB Minta Dukungan Internasional Lebih Besar untuk Afghanistan

JENEWA (IM) - PBB meminta dukungan internasional yang lebih besar untuk Afghanistan. Hal itu disampaikan setelah negara tersebut diguncang gempa dahsyat yang menewaskan lebih dari 1.150 orang.

Wakil Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan Dr Ramiz Alakbarov telah mengunjungi warga yang terdampak gempa di negara tersebut. "Kunjungan kemarin (Sabtu, 25 Juni 2022) menegaskan kembali kepada saya perentaraan ekstrem orang-orang di Afghanistan dan tekad mereka yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan besar," ucapnya seperti dikutip laman UN, Senin (27/6) News.

Alakbarov mengunjungi desa Mir Sahib dan Khanadin yang terletak di distrik Giyan, Provinsi Paktika. Daerah itu menjadi yang paling terdampak gempa berkekuatan 6,1 skala richter pada Rabu (22/6) pekan lalu. "Terlepas dari kedermawanan fenomenal yang telah ditunjukkan oleh para donor ke Afghanistan selama sepuluh bulan terakhir yang penuh gejolak ini, saya mendesak masyarakat internasional untuk menggali lebih dalam saat ini, karena penduduk menghadapi keadaan darurat lain," katanya.

Menurut dia, selain bantuan makanan dan tempat penampungan darurat, pembenahan pipa air yang rusak serta kesiapsiagaan terhadap risiko kolera sangat penting. Pemulihan jalur komunikasi, akses jalan, dan mata pencaharian dasar pun signifikan. "Tanpa dukungan transisi seperti itu, wanita, pria, dan anak-anak akan terus menanggung kesulitan yang tidak perlu dan tak terbayangkan," ujar Alakbarov.

Di tengah krisis demikian, Taliban telah meminta komunitas internasional mencabut sanksi dan mencairkan aset yang sedang dibekukan milik Afghanistan. "Imarah Islam meminta dunia untuk memberikan hak paling dasar kepada warga Afghanistan, yakni hak mereka untuk hidup dan itu melalui pencabutan sanksi serta pencairan aset kami, dan juga pemberian bantuan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Taliban Abdul Qahar Balkhi saat diwawancarai Reuters, Sabtu (25/6).

Sejak merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus tahun lalu, sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS), memberlakukan sanksi terhadap pemerintahan Taliban. Washington, misalnya, membekukan aset bank sentral Afghanistan senilai hampir 10 miliar dolar AS. ● ans



IDN/ANTARA

PEMUSNAHAN NARKOBA DI YAMAN

Personel polisi berkumpul saat narcoaba yang disita sedang dibakar di Sanaa, Yaman, pada Minggu (26/6).

Duterte Kecam Rencana ICC Buka Kembali Penyelidikan Perang Narkoba Filipina

MANILA (IM) - Kantor Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam niat Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan untuk membuka kembali tindakan Filipina dalam perang melawan narcoaba. Khan sebelumnya mengatakan bahwa penundaan penyelidikan ICC di Manila harus dimulai kembali sesegera mungkin.

Juru bicara kepresidenan Martin Andanan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintahan Duterte telah melakukan penyelidikan atas semua kematian yang timbul dari operasi penegakan hukum obat-obatan terlarang di negara tersebut. ICC harus membiarkan upaya pemerintah berjalan sesuai rencana.

September lalu, hakim ICC menyetujui penyelidikan terhadap kampanye yang menewaskan ribuan tersangka pengedar narcoaba. Aktivist mengatakan banyak yang telah dieksekusi oleh lembaga penegak hukum dengan dukungan diam-diam dari presiden. ICC menengguhkan

penyelidikan pada November atas permintaan Manila. Pemerintah yang menghitung kematian perang narcoabanya berlangsung hingga Mei 2022, secara resmi mengakui 6.252 kematian.

Duterte telah membea polisi dan berargumen bahwa semua yang tewas adalah pengedar narcoaba yang melawan saat ditangkap. Dia secara terbuka mengatakan polisi bisa membunuh jika mereka yakin mereka dalam bahaya dan dia akan mengampuni siapa pun yang berakhir di penjara.

Penasihat keadilan internasional senior di Human Rights Watch, Maria Elena Vignoli mengatakan permintaan Khan untuk melanjutkan penyelidikan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang narcoaba adalah dorongan untuk akuntabilitas. "Pemerintah tidak serius tentang keadilan atas kejahatan ini sementara keluarga korban berduka tanpa ganti rugi dan mereka yang bertanggung jawab tidak menghadapi konsekuensi," kata Vignoli dalam sebuah pernyataan. ● gul



IDN/ANTARA

UNJUK RASA ANTI NATO DI SPANYOL

Demonstran dalam protes anti-NATO menjelang KTT NATO, yang akan diselenggarakan pada 28 Juni dan 30 Juni di Madrid, Spanyol, Minggu (26/6).